

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DESA MANDIRI BENIH (PDMB) DI  
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2015-2017**

**Oleh : Siska Andriani**

*Email: [Sisca.andriany49@gmail.com](mailto:Sisca.andriany49@gmail.com)*

**Pembimbing : Rury Febrina, S.IP M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***ABSTRACT***

*The Seed Independent Village Program (PDMB) is a follow-up to the Indonesian president Joko Widodo's program in realizing food independence, the effort of the collar is to increase productivity by increasing the quality of the seeds used. The aim is to increase capacity to meet the needs of seeds in their respective regions. The purpose of this research is firstly how to Evaluate the Implementation of the Independent Seed Village Program in Rokan Hulu Regency 2015-2017. Secondly, to find out the factors that hinder the evaluation of the implementation of the Seed Independent Village Program in Rokan Hulu Regency. The theoretical concept used by the author is the Public Policy Evaluation Criteria in the implementation of the program by William N. Dunn. This research uses qualitative research methods with descriptive studies.*

*The results of this study indicate that the evaluation of the implementation of the Independent Seed Village Program (PDMB) in Rokan Hulu Regency from the six indicators of the policy evaluation criteria used is effectiveness, there are still a number of villages where the PDMB has not succeeded in achieving the target program. Efficiency, the amount of effort done by program implementing actors by providing assistance and providing counseling, training or guidance. Adequacy, the funds provided in the implementation of the program depend on the use or utilization of each PDMB and some villages feel they are sufficient on the funds provided. Flattening, this program is given evenly to the people whose villages are categorized as seed prone. Responsiveness, the response of the community is not good because community complaints are not responded to be followed up. And accuracy, this program since 2015 is still used as the right solution to increase seed production, especially in their respective regions. Several factors hampered the evaluation of program implementation such as lack of human resources in program implementation, local regulations regarding the program, lack of government handling of unstable weather conditions and lack of socialization by related actors in program implementation.*

***Keywords: Policy Evaluation, Food, Seed Independent Village Program.***

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, dengan pembagian daerah yang terdiri dari ruang lingkup yang luas sampai yang terkecil yaitu Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota yang dibagi atas Kecamatan dan Desa. Pemerintah pusat memiliki urusan pemerintahan absolut dengan melaksanakan urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter fiskal nasional dan agama, sehingga akan mengalami kesulitan untuk menjangkau seluruh urusan pemerintahan lainnya tanpa bantuan dari pemerintahan daerah.

Urusan pemerintahan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu dimana dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah terbagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintah absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Terkait dengan adanya urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota yang salah satunya adalah bidang pertanian. Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Penyelenggaraan Pangan dilakukan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan
- b. kemandirian
- c. ketahanan
- d. keamanan
- e. manfaat
- f. pemerataan
- g. berkelanjutan dan
- h. keadilan

Pertanian merupakan salah satu yang diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia, terutama pada bidang tanaman pangan seperti beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia pada umumnya. Sejak tahun 2015 Kementerian Pertanian telah membentuk upaya untuk mengatasi kekurangan swasembada pangan yaitu meningkatkan penanaman dan produksi pangan melalui kegiatan dengan membuat Program Desa Mandiri Benih (PDMB). Program ini sebagai tindak lanjut dari program Presiden RI Joko Widodo yakni mewujudkan kemandirian pangan. Dalam rangka mendukung Program Presiden Republik Indonesia periode 2015-2019, dimana salah satunya adalah mewujudkan kemandirian pangan dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik sebagaimana yang tertera dalam 9 (*sembilan*) Agenda Prioritas Pembangunan, maka penanggulangan kemiskinan pertanian dan regenerasi petani menjadi fokus utama pembangunan pertanian. Salah satu upaya kearah tersebut adalah pencaangan desa berdaulat pangan hingga tahun 2019. Untuk tercapainya berdaulat pangan prioritas pembangunan pertanian yang harus terwujud adalah tercapainya sasaran produksi padi, jagung, dan kedelai. Pencapaian sasaran produksi tersebut memerlukan upaya konkrit dalam peningkatan produktivitas. Sementara peningkatan produktivitas dan kualitas hasil tanaman sangat dipengaruhi oleh kualitas benih yang digunakan petani. (Kepmentan No.207 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Desa Mandiri Benih tahun 2016).

Terkait dengan hal itu sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yaitu “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan kedaulatan pangan, arah kebijakan pemantapan kedaulatan pangan dilakukan dengan beberapa strategi utama diantaranya peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri salah satunya peningkatan produktivitas revitalisasi sistem perbenihan nasional dan daerah melalui pencanangan desa berdaulat benih”. (RPJMN, 2015-2019:202).

Pelaksanaan Program Desa Mandiri Benih pemerintah pusat berkewenangan dalam membuat kebijakan yang dijalankan oleh Dirjen Tanaman Pangan, kemudian pelaksanaannya di serahkan kepada pemerintah daerah yaitu Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten sebagai penanggung jawab di daerah (Jurnal, Analisis Kebijakan Pertanian oleh Valeriana Darwis 2018:64).

Berdasarkan pedoman teknis tujuan dibentuknya Program Desa Mandiri Benih adalah untuk memberikan fasilitas kepada kelompok tani, kelompok penangkar atau gabungan kelompok tani dengan kelompok penangkar untuk meningkatkan kapasitas (*Capacity building*) dalam rangka memproduksi benih guna memenuhi kebutuhan benih di wilayahnya. (*Pedoman Teknis Desa Mandiri Benih, 2016:2*).  
Desa Mandiri Benih di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015-2017 :

No.	Kecamatan	Nama Desa
1.	Rambah	Menaming Pasar Maju Rambah Tengah Barat Pasar Baru
2.	Rambah Samo	Rambah Baru Pasar Makmur
3.	Rokan IV Koto	Cipang Kiri Hulu Kelurahan Rokan
4.	Bangun Purba	Bangun Purba Timur Jaya

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Rokan Hulu.

Menurut Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu, mengenai pembiayaan pelaksanaan kegiatan Program Desa Mandiri Benih bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Biaya digunakan untuk pengadaan sarana produksi, biaya sertifikasi benih, pengadaan alat dan mesin pengolahan benih, pengemasan benih, pembangunan gudang penyimpanan benih dan pembuatan lantai jemur. Anggaran itu juga dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan terus disempurnakan.

Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu menambahkan proses pelaksanaan Program Desa Mandiri Benih di Kabupaten Rokan Hulu melibatkan pihak-pihak seperti Dinas Pertanian sebagai instansi teknis dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah/Desa (UPTD), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan petani/kelompok tani/penangkar.

Alokasi bantuan benih dan produksi benih dari Program Desa Mandiri Benih di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2017:

Thn	Desa Pelaksana PDMB	Alokasi Benih (Kg)	Target PDMB (Ton)	Produksi PDMB (Ton)
2015	Menaming	250	30	15
	Pasar Maju	250	30	42
	Rambah	250	30	12
	Tengah Barat	250	30	15
	Bangun Purba	250	30	15
2016	Timur Jaya	250	30	30
	Kelurahan Rokan	250	30	30
	Pasar Baru	250	30	40
2017	Rambah Baru	250	30	40
	Pasar Makmur	250	30	40
	Cipang Kiri Hulu	250	30	40
<b>Jumlah</b>		<b>2.250</b>	<b>270</b>	<b>234</b>

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu.

Data tersebut diatas menggambarkan realisasi produksi benih terhadap target dari program desa mandiri benih terdapat ada beberapa desa yang berhasil dan ada beberapa desa yang tidak berhasil mencapai target produksinya. Dengan demikian produksi benih yang dihasilkan dari program desa mandiri benih selama tiga tahun pelaksanaan masih terdapat beberapa desa yang belum berhasil sehingga Kabupaten Rokan Hulu secara umum belum mampu peningkatan produksi benih unggul dengan optimal di daerah khususnya di beberapa desa yang melaksanakan PDMB.

Di Kabupaten Rokan Hulu permasalahan khusus pertanian dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri Benih diantaranya :

1. Belum signifikan peningkatan produksi benih yang dihasilkan dari program desa mandiri benih di masing-masing desa yang melaksanakan PDMB.
2. Terdapat beberapa desa yang hasil produksinya belum mampu mencapai target produksi program desa mandiri benih.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten dibidangnya dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di tiap desa yang turun langsung kelapangan melakukan pendampingan.
4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat kelompok tani pelaksana program saat kegiatan telah berlangsung.

Berdasarkan latar belakang diatas Program Desa Mandiri Benih merupakan upaya peningkatan penanaman dan produksi benih melalui benih unggul yang digunakan. Permasalahan yang memicu dalam pelaksanaan program perlu ditelaah, sehingga penelitian ini ingin mengarah pada “*Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Mandiri Benih (PDMB) di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2017*”.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas maka masalah yang diangkat akan dirumuskan dalam pertanyaan penelitian berikut :

1. Bagaimana evaluasi pelaksanaan Program Desa Mandiri Benih (PDMB) di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015-2017?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat dalam evaluasi pelaksanaan Program Desa Mandiri Benih (PDMB) di Kabupaten Rokan Hulu?

## KERANGKA TEORI

### Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu, pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya (Miriam Budiardjo, 2008:20).

Kebijakan publik terdiri dari 2 konsep dasar “kebijakan dan publik”. Kebijakan adalah keputusan pemerintah yang dibuat oleh seseorang yang memegang kekuasaan baik formal maupun informal. Publik adalah masyarakat umum, rakyat atau pemegang saham. Oleh karena itu kebijakan publik adalah keputusan negara atau pemerintah (sebagai pemegang kekuasaan) untuk me-manage kehidupan publik (sebagai lingkungan) agar dapat mencapai misi bangsa (Nugroho, 2008:47).

Ada 2 paradigma kebijakan publik di negara-negara berkembang (Nugroho, 2008:60), yaitu:

1. Paradigma yang melihat kebijakan publik sebagai tugas pemerintah semata.
2. Paradigma yang melihat kebijakan publik sebagai saling memengaruhi antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut Samudra Wibawa (1993) kebijakan publik memiliki empat fungsi, (Nugroho, 2003:186-187), yaitu:

- a. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realita pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realita yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan keberhasilan dan kegagalan kebijakan.
- b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- d. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

### Evaluasi

Dalam Nurcholis(2005:169) Evaluasi merupakan suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dari aspek pelaksanaan, evaluasi adalah keseluruhan kegiatan pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran dan pertimbangan untuk membuat keputusan. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan atau proses untuk mengukur dan selanjutnya menilai sampai dimanakah tujuan yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan. Evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu.

Menurut Edward A. Suchman dikutip Winarno, 2002:169, (dalam Nugroho, 2003:199), mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Dunn (2003:608), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

### Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Dunn menggambarkan kriteria-kriteria dalam mengevaluasi suatu program atau kebijakan untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik yaitu:

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok- tertentu?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

(Sumber: Nugroho, 2003:186)

Dalam Nugroho (2008:261), tujuan pokok evaluasi bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi, evaluasi kebijakan harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Ciri dari evaluasi kebijakan adalah :

- a. Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan.
- b. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan target kebijakan.
- c. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi.
- d. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.
- e. Mencakup rumusan, implementasi lingkungan dan kinerja kebijakan.

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang mengarah pada pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati (Moleong, 2004:4). Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran tentang evaluasi Program Desa Mandiri Benih di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015-2017.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu khususnya pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu sebagai instansi terkait. Alasannya selain potensi pertanian di Kabupaten Rokan Hulu yang cukup baik dalam usaha

pertanian, juga dalam perencanaan pelaksanaan program ini Kabupaten Rokan Hulu mencanangkan ketersediaan benih didaerah bahkan luar daerah melalui Program Desa Mandiri Benih. Tetapi dari hasil realisasinya di daerah sendiripun ketersediaan benihnya masih belum optimal dan mencukupi untuk beberapa desa. peneliti memilih tahun 2015-2017 yang diteliti karena tahun 2015 merupakan awal pelaksanaan program dan dilakukan pengembangan serta penguatan pada tahun 2016-2017.

### Sumber Data

#### Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang menjadi narasumber dalam penelitian untuk memberikan keterangan.

#### Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Ardi SP	Kabid Program Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Riau	1
2.	Mubrizal SP.MMA	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Rokan Hulu	1
3.	Ricuh	Seksi Pengembangan Tanaman Serelia Rokan Hulu	1
4.	Zulkifli SP	UPTD Tanaman Pangan Rokan Hulu	1
5.	Jufrianto	PPL	1
6.	Amin CB Gazali	Kapoktan - Harapan Maja Setia - Karya Jaya	2

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Mandiri Benih di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2017

Evaluasi kebijakan terhadap pelaksanaan Program Desa Mandiri Benih yang dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program untuk mengukur kesesuaian antara tujuan, target kebijakan serta hasil yang dicapai. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan tolak ukur kriteria evaluasi oleh William N.Dunn sebagai berikut :

#### **Efektivitas**

Menurut William N.Dunn efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan (maksimal), atau mencapai suatu tujuan dari diadakannya tindakan, lepas dari pertimbangan efisiensi. Dalam evaluasi kebijakan terhadap Program Desa Mandiri Benih adalah pencapaian tingkat keberhasilan target program desa mandiri benih dapat menjadi tolak ukur efektivitas dari program PDMB di Kabupaten Rokan Hulu terhadap hasil (akibat) yang diharapkan dari masyarakat pelaksana program tersebut. Hasil yang diperoleh dari tingkat pencapaian PDMB sudah terpenuhi di beberapa desa sendiri tetapi dalam lingkup secara umum daerah Kabupaten Rokan Hulu belum mencukupi, ada pencapaian yang belum cukup memuaskan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan dari program PDMB dalam tujuannya untuk meningkatkan produksi benih masyarakatnya secara mandiri belum berhasil dengan maksimal.

#### **Efisiensi**

Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Provinsi Riau dan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu adalah dengan melakukan pelatihan, penyuluhan dan bimbingan serta mengundang stakeholder untuk bersinergi. Hal lain yaitu memberikan bantuan benih dan bantuan berupa transfer uang dan barang kepada kelompok tani/penangkar PDMB yang melaksanakan program ini sehingga dengan upaya ini diharapkan PDMB itu bisa lebih terbantu, termotivasi dan jauh lebih berkembang lagi. Selain itu usaha yang dilakukan pihak pendamping dalam hal ini Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) melakukan pengecekan langsung kelapangan pada saat proses kegiatan berlangsung oleh Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Rokan Hulu yaitu UPTD dan PPL untuk memantau kelompok tani/penangkar PDMB dalam mengelola dan melaksanakan programnya.

#### **Kecukupan**

Program PDMB sejatinya adalah untuk meningkatkan produksi benih masyarakat daerah masing-masing, sehingga dengan adanya program ini tingkat produksi dan ketersediaan benih masyarakat didesa bisa lebih baik lagi. Adapun tingkat kecukupan bisa dilihat dari segi dana yang digulirkan, apakah sebenarnya dana yang diberikan jumlahnya sudah bisa mencukupi kebutuhan masyarakat pelaksana program ini. sebenarnya jumlah dana yang bergulir sudah mencukupi dengan yang dibutuhkan oleh anggota kelompok tani/penangkar PDMB, namun itu tergantung pada penggunaan dan pemanfaatan dana oleh anggota kelompok tani PDMB masing-masing.

#### **Perataan**

Dari perataan segi manfaat sebenarnya program PDMB sebenarnya bisa dirasakan oleh anggota kelompok, karena pada dasarnya program ini beranjak dari kelompok, pengelolaan dan pertanggung jawaban kegiatan kelompok lah yang dominan mengelola, meskipun hasil

pencapaian dari program ini belum semua PDMB merata merasakan manfaatnya.

Sementara perataan segi keadilan menunjukkan bahwa program PDMB yang diberikan oleh pemerintah kepada desa-desa yang memang membutuhkan dikatakan merata dan adil diberikan kepada mereka yang kondisi benihnya perlu ditingkatkan atau rawan benih. Karena desa-desa yang mendapatkan program ini ditetapkan melalui pemilihan dan verifikasi oleh dinas terkait dengan kriteria penetapan yang telah ditentukan.

### **Responsivitas**

Responsivitas merupakan adanya hubungan interaksi sosial, sehingga memudahkan dalam melaksanakan program yang dijalani oleh setiap kelompok PDMB. Peran serta masyarakat dalam membantu atau mengawasi kegiatan serta mengetahui betul akan adanya program PDMB merupakan upaya yang harus dibangun dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini.

Hal yang menandakan adanya tanggapan antara masyarakat pelaksana program dalam pelaksanaan program PDMB adalah Masyarakat berterima kasih dengan adanya program ini karena dengan adanya PDMB ini tingkat kebersamaan masyarakat desa semakin meningkat. Walaupun dari segi ekonomi belum dirasakan tetapi dari segi sosial seperti kebersamaan dan gotong royong antar pelaksana program sangat bisa dirasakan. Sementara respon masyarakat terhadap pemerintah yaitu Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Rokan Hulu kurang baik terkait penanganan terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat pelaksana program untuk ditindaklanjuti. Sebaliknya respon pemerintah yang dikatakan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu Bapak Mubrizal SP.MMA menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak menerima bantuan program awalnya memiliki rasa kecemburuan sosial, kemudian masalah ini bisa diperbaiki setelah verifikasi kriteria atau ketentuan-ketentuan bagi yang berhak

menerima bantuan program. Meskipun demikian masyarakat yang tidak menerima bantuan program ini sebelumnya masih mengharapkan bisa untuk masuk menjadi bagian kelompok tani penerima bantuan program PDMB, hanya saja dengan keadaan PDMB yang sekarang bisa disebut jalan ditempat nampaknya sangat sulit untuk berkembang bahkan sulit untuk merekrut anggota-anggota baru.

### **Ketepatan**

Ketepatan merupakan adanya ide-ide atau asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut tentang program kelompok PDMB, apakah kebijakan dengan mengeluarkan program tersebut sudah memberikan kontribusi yang baik bagi peningkatan produksi benih masyarakat Kabupaten Rokan Hulu khususnya Desa yang melaksanakan program ini. Tujuan dari hasil yang akan dirasakan dari program PDMB ini adalah mampu memberikan peningkatan terhadap produksi benih masyarakat penerima bantuan program, serta apakah program PDMB ini merupakan suatu kebijakan yang memang dibutuhkan masyarakat.

Program PDMB yang digulirkan pemerintah sejak tahun 2015 tersebut merupakan suatu solusi yang tepat, karena dari segi tujuan utamanya yaitu peningkatan produksi benih utamanya daerah masing-masing untuk menjadi desa yang mandiri akan kebutuhan benih sehingga dengan produksi benih meningkat tidak perlu mendatangkan benih dari luar daerah lagi. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya program ini maka pemerintah memberi jalan supaya masyarakat yang menerima bantuan atau yang melaksanakan program ini bisa lebih hidup mandiri tanpa ketergantungan dengan daerah lain. Akan tetapi realisasi hasil dari program ini belum sesuai atau belum tepat karena masih terdapat beberapa desa yang PDMB nya berhasil dan juga yang tidak berhasil. Hal ini tentu saja faktor-faktor serta kendala tertentu yang mempengaruhi dalam mengelola dan melaksanakan program yang membuatnya belum berhasil.

## **Faktor-Faktor Penghambat Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Mandiri Benih (PDMB) di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2017**

### **1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten dalam Pelaksanaan Program Desa Mandiri Benih (PDMB)**

Terdapat faktor sumber daya manusia adapun hambatan yang terjadi adalah kurangnya penyuluh pertanian di setiap desa, dan kurang mengetahuinya informasi kepada kelompok tani/penangkar sehingga mempengaruhi dalam proses pelaksanaan program.

Sedangkan dari sisi masyarakat pelaksana program ini, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program desa mandiri benih tidak berjalan dengan baik, dimana dalam pelaksanaan dan pengelolannya dibutuhkan sumber daya manusia yang sesuai baik pendidikan dan memiliki kemampuan dibidangnya sehingga setiap pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Tingkat pendidikan pelaksana program yaitu kelompok tani yang rata-rata masih dibawah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan dalam mencapai target program. Selain pendidikan kemampuan dan pengalaman organisasi, komunikasi dan berjiwa sosial yang baik juga merupakan faktor yang mempengaruhi sehingga dengan sumber daya manusia yang demikian kelompok tani pelaksana program akan lebih mudah memahami dan mengelola pelaksanaan program desa mandiri benih di Kabupaten Rokan Hulu.

Jumlah Sumber Daya Manusia Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu Pelaksana Program Desa Mandiri Benih (PDMB) Tahun 2015-2017 :

Tahun	Jumlah SDM
2015	8
2016	6
2017	5

### **2. Tidak adanya Peraturan Daerah tentang Program Desa Mandiri Benih (PDMB).**

Tidak adanya Peraturan Daerah sangat menyulitkan dalam melaksanakan program tercapai dengan baik di kabupaten Rokan Hulu. Seperti yang kita ketahui bahwa seharusnya suatu program dari sebuah kebijakan memerlukan pedoman atau aturan yang dapat mengatur mengenai pelaksanaan suatu program, agar dengan peraturan daerah tersebut lebih mengkhususkan aturan-aturannya di daerah sesuai potensi dan kondisi suatu daerah terkhususnya di Kabupaten Rokan Hulu.

peraturan Daerah tentang Program Desa Mandiri Benih (PDMB) di kabupaten Rokan Hulu belum diterbitkan karena benih di kabupaten Rokan Hulu belum menjadi prioritas utama yang menjadi prioritas lebih pada mandiri pangan, padahal seharusnya sebagai dasar untuk melakukan pelaksanaan mandiri pangan yang efektif dan efisien juga terlebih dahulu memperhatikan kondisi dan kualitas benih yang dihasilkan.

### **3. Kurangnya Penanganan Pemerintah terhadap Kondisi Iklim dan Cuaca yang tidak Stabil**

Faktor eksternal dari lingkungan yang mempengaruhi proses pelaksanaan program dan produksi pertanian, pengalaman menunjukkan bahwa berbagai bentuk penyimpangan iklim dan cuaca telah sering mengancam system produksi pertanian baik ancaman gangguan produksi juga menggagalkan panen.

Faktor kondisi lingkungan menjadi salah satu penghambat pencapaian hasil produksi benih. Dengan pelaksanaan proses produksi benih tanaman yang terganggu sehingga akan berpengaruh terhadap hasil produksi calon benih yang diharapkan. Terjadinya banjir dan kekeringan berbagai tempat dan waktu sulit untuk diprediksi, ramalan hujan dan kemarau hanya memberikan informasi mengenai waktu terjadinya padahal perkembangan benih membutuhkan

air dengan jumlah dan saat yang tepat.

#### **4. Kurangnya Sosialisasi dalam Pelaksanaan Program Desa Mandiri Benih (PDMB).**

Kegiatan sosialisasi sangatlah dibutuhkan karena dengan cara ini suatu program dapat dipublikasikan dan dikenal kepada masyarakat dengan demikian masyarakat dapat mengetahui mengenai adanya suatu program. Dalam penelitian yang dilakukan penulis menemukan fakta bahwa beberapa kelompok tani tidak mengerti dengan proses pelaksanaan program serta tujuan dari program desa mandiri benih. Hal ini karena kurangnya sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat dan kelompok tani pelaksana program.

Sosialisasi yang didapat oleh masyarakat khususnya kelompok tani pelaksana program mengenai PDMB, mereka diberikan bantuan sarana dan prasarana, namun banyak dari kelompok sasaran yang tidak mengerti bagaimana prosedur dan tahapan-tahapan yang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dalam proses pelaksanaan dan pengelolaan program. Terjadinya pelatihan dan bimbingan kepada kelompok tani pelaksana program hanya dilakukan pada saat awal kegiatan akan dilaksanakan, selanjutnya pada saat kegiatan telah berlangsung perhatian para aktor yang terlibat dalam proses pelaksanaan program desa mandiri benih ini berkurang, masyarakat dan kelompok tani dibiarkan secara mandiri dalam mengelola pelaksanaan program sehingga kelompok tani hanya melaksanakan program ini sesuai dengan apa yang di perintah dan apa yang mereka ketahui.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi pelaksanaan Program Desa Mandiri Benih (PDMB) di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015-2017

peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Efektivitas pelaksanaan program Desa Mandiri Benih di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015-2017 belum sepenuhnya berjalan efektif dan maksimal, terdapat beberapa desa yang berhasil dalam mencapai target program dan masih terdapat beberapa desa yang melaksanakan program ini PDMB nya belum berhasil dalam mencapai target program. Efisiensi, jumlah usaha yang dilakukan oleh aktor pelaksana program dengan memberikan bantuan serta penyuluhan, pelatihan dan bimbingan. Kecukupan, dana yang diberikan dalam pelaksanaan program tergantung penggunaan dan pemanfaatan setiap PDMB dan beberapa desa merasa cukup dengan dana yang diberikan. Perataan, program ini diberikan merata kepada masyarakat yang desanya dikategorikan rawan benih. Responsivitas, tanggapan masyarakat kurang baik karena keluhan masyarakat kurang ditanggapi untuk ditindaklanjuti. Dan ketepatan, sejak tahun 2015 program ini masih dijadikan solusi yang tepat untuk meningkatkan produksi benih utamanya daerah masing-masing.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri Benih (PDMB) di Kabupaten Rokan Hulu adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pelaksanaan program yaitu kurangnya penyuluh pertanian disetiap desa, tidak adanya Peraturan Daerah tentang Program Desa Mandiri Benih (PDMB), Kurangnya penanganan terhadap kondisi iklim dan cuaca yang tidak stabil dan kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri Benih.

## Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam evaluasi pelaksanaan Program Desa Mandiri Benih (PDMB) di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015-2017, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia perlu ditingkatkan terhadap bidang yang sesuai dengan kompetensinya, memaksimalkan penyuluh yang turun langsung ke lapangan di setiap desa yang melaksanakan program supaya kegiatan lebih terkontrol dan terpantau dengan baik, menerbitkan peraturan daerah terkait program, melakukan pencegahan dan penanganan terhadap tidak mendukungnya kondisi cuaca yang bisa mengakibatkan terkendalanya proses pelaksanaan program, melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan program berupa pelatihan dan bimbingan lebih lanjut baik pada saat awal pelaksanaan kegiatan, saat kegiatan berlangsung sampai kegiatan selesai.
2. Kepada seluruh Tim Pelaksana Program Desa Mandiri Benih (PDMB) agar terus menjalin kerja sama yang baik.
3. Kepada peneliti dan pembaca selanjutnya disarankan kirik dan masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn N, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University.
- Ekowati, Mas Roro. 2005. *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*

*atau Program, Edisi Revisi*. Bandung. PT Rosdakarya.

Moeleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.

Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta. Grasindo.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Subejo, dkk. 2014. *5 Pilar Kedaulatan Pangan Nusantara*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung. ALFABETA.

Syamsuddin, Haris. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta. LIPI Press.

### Skripsi

Skripsi Zamira Ulfa, 2014. "Evaluasi Program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) di Kabupaten Pelalawan Tahun 2010-2013". Fisipol, Ilmu Pemerintahan. Universitas Riau.

Skripsi Muhammad Gustain, 2016. "Pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak (Studi Kasus Tanaman Padi)". Fisipol, Administrasi Negara. Universitas Riau.

Skripsi Ibnu Eka Kurniawan, 2011. "Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan di Kabupaten Rokan Hulu". Faperta. Universitas Pasir Pengaraian.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kepmentan No.207 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Desa Mandiri Benih.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu

